

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan

Sejak terbentuk secara definitif pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya melaksanakan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping hasil pembangunan yang telah dicapai, baik yang terkait dengan urusan wajib maupun pilihan yang diemban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan, dijumpai pula beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi dan dituntaskan dalam jangka menengah ke depan (periode 2012-2017). Permasalahan tersebut akan diatasi secara terpadu, komprehensif, dan tepat, mengingat dampaknya berpotensi begitu besar menghambat kemajuan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya. Inti permasalahan tersebut terjadi pada umumnya akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Adapun permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya yang harus diatasi dalam jangka menengah ke depan dirangkum sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Syariat Islam Belum Maksimal

Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat melalui penyelenggaraan keistimewaan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Lebih lanjut, lahirnya Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat legitimasi dan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islami yang selama ini kurang maksimal diamalkan masyarakat, harus dibangkitkan kembali dan diaktualisasikan

secara terus menerus dalam setiap kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat"**, bermakna bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan secara nyata di Kabupaten Nagan Raya. Implementasi Syariat Islam secara kaffah harus ditingkatkan di seluruh aspek kehidupan, baik perorangan, keluarga, di kalangan pemerintahan, maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Belum sempurnanya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islami di kalangan masyarakat Kabupaten Nagan Raya merupakan permasalahan serius yang menyebabkan Syariat Islam belum terlaksana secara kaffah. Kehidupan modernisasi yang didorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut pula menggeser nilai-nilai syariat Islam. Kondisi tersebut telah mewabah pada generasi muda dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, masih lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga menyebabkan masih terjadinya pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang Islami, pemantapan akidah dan pemahaman ajaran Islam mutlak diprioritaskan. Selain itu, program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan juga harus ditingkatkan, termasuk mengoptimalkan peran ulama dalam mendorong pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya untuk lima tahun mendatang.

4.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, birokrasi dan struktur organisasi pemerintah yang dibentuk harus efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Jika ini dapat direalisasikan, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam jangka menengah ke depan (periode 2012-2017). Karena itu, upaya strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam jangka menengah ke depan, mulai dari *penataan birokrasi, memodernisasi birokrasi, penataan kembali struktur organisasi, perbaikan sistem kerja, pembuatan indikator kinerja organisasi dan kinerja pegawai, pembuatan prosedur operasi standar (SOP), dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)*.

Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1), mengamanatkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Lebih lanjut, dalam penyusunannya diupayakan pula belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan. Di sisi lainnya, belanja publik (belanja langsung) yang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat harus lebih besar dari belanja aparatur (belanja tidak langsung).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 mengamanatkan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010–2014. Akhir tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya hanya mampu mengalokasikan untuk belanja modal sebesar 22,33 persen. Karena itu, dalam jangka menengah ke depan diharapkan pengalokasian belanja modal terus

meningkat sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

4.1.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

Kemiskinan merupakan isu strategis nasional dan daerah yang harus ditanggulangi secara komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun secara statistik persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya masih tergolong tinggi yang melebihi angka rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh. Kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan semata tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kondisi tersebut mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan. Masalah kemiskinan merupakan hal mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan. Karena itu, diperlukan dukungan dan peran aktif semua pihak untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian, visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nagan Raya akan dapat diwujudkan lima tahun ke depan.

Terbatasnya investasi di daerah dan belum adanya keterkaitan yang kuat antarsektor pembangunan, khususnya pertanian dan industri pengolahan menyebabkan pula terbatasnya lapangan kerja di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, iklim usaha yang relatif kondusif dan kebijakan investasi yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sesuai implimentasi UU No.11 Tahun 2006 turut menghambat arus investasi di Kabupaten Nagan Raya. Implikasinya, masih ditemui angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan secara layak. Masalah pengangguran akan terus diupayakan diatasi secara bijak dan tepat serta menjadi prioritas selama lima tahun ke depan di Kabupaten Nagan

Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan memastikan dan berusaha menyediakan kesempatan kerja yang seluasnya bagi tenaga kerja terampil, inovatif, dan kreatif di segala bidang pembangunan.

Dalam jangka menengah ke depan, kebijakan dan implimentasi pembangunan yang *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan komprehensif yang melibatkan antarSKPK di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan anggaran dan implimentasi program pembangunan *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai pula sangat strategis serta diharapkan intensitasnya terus meningkat dalam jangka menengah ke depan. Antara lain, mencakup penguatan program PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan, peningkatan alokasi dana gampong, bantuan kredit usaha kerja bagi pelaku UMKM, bantuan raskin, dan pemberdayaan sosial-ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya secara bertahap dan berkelanjutan.

Isu strategis lainnya adalah disparitas antarwilayah di Kabupaten Nagan Raya. Relatif meratanya pembangunan antarwilayah telah menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan, terutama di gampong-gampong tertinggal. Terbatasnya anggaran pemerintah, salah satunya merupakan pemicu tidak semua daerah mendapat pembangunan infrastruktur dan pelayanan pembangunan sosial-ekonomi. Ketimpangan antarwilayah akan ditanggulangi melalui penyediaan infrastruktur yang representatif yang bersumber dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Diupayakan pula melalui pinjaman lunak dan mengandalkan investasi swasta yang diharapkan dalam jangka menengah disparitas pembangunan antarwilayah dapat diatasi secara berkelanjutan.

4.1.4 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan globalisasi dan Otonomi Daerah, tingkat persaingan di tingkat global, regional, dan nasional semakin kompetitif. Setiap daerah terus berlomba dan melakukan berbagai inovasi yang kreatif untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif demi mendorong pertumbuhan ekonominya. Karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan perekonomian di masa mendatang di Kabupaten Nagan Raya. Daya saing merupakan indikator kunci agar Kabupaten Nagan Raya dapat menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mempunyai produktifitas tinggi serta kepastian hukum harus menjadi prioritas strategi jangka menengah.

Tingkat daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Nagan Raya yang diukur dari perbandingan tenaga kerja berpendidikan tinggi dengan jumlah penduduk masih sangat timpang. Itu artinya, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya masih relatif menggembirakan. Dari sisi produktivitas ekonomi, yang diukur dari angka ketergantungan (*dependency ratio*) antara penduduk usia produktif dan non produktif juga relatif tinggi. Kondisi ini diperkirakan dalam jangka menengah dapat menghambat percepatan pembangunan daerah akibat pengelolaan sumberdaya ekonomi lokal yang cenderung tidak optimal. Rendahnya kualitas keahlian dan keterampilan tenaga kerja menyebabkan pula kesulitan dalam meraih peluang-peluang strategis kesempatan kerja serta akan menghadapi tantangan kerja yang lebih berat sesuai dengan perkembangan dan dinamika global.

Pembangunan manusia menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah di Kabupaten Nagan Raya. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif menggembirakan, meskipun cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Saat ini kedudukan pembangunan manusia Kabupaten Nagan Raya termasuk kategori menengah atas. Karena itu, terobosan kebijakan dan program pembangunan manusia yang inovatif

akan terus digulirkan demi mencapai pembangunan manusia berkualitas dan menempati kategori tinggi (IPM 0,80).

Disisi lainnya, upaya peningkatan kualitas SDM sebagai tindak lanjut dari perbaikan daya saing tidak hanya berkuat secara kuantitas, namun akan lebih difokuskan secara kualitas. Perbaikan tersebut diupayakan melalui penguatan pendidikan berkualitas di semua jenjang pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta memperluas kesempatan magang, pelatihan dan studi lanjut.

4.1.5 Terbatasnya Investasi dan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Nagan Raya sekaligus mencapai visi jangka menengah daerah dibutuhkan penanaman modal (investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan industrialisasi berbasis pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, termasuk investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal ini merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di daerah, pengaturan pajak, dan reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan pendanaan kurun waktu 2012-2017.

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan daerah. Implikasinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan cukup besar. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan berperan penting dalam pendanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satunya, adalah belum lengkapnya data tentang objek pajak dan retribusi daerah yang akurat. Data potensi PAD sangat berperan penting dalam penentuan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Data potensi PAD juga sangat

diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD serta pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabilitas.

Disamping itu, belum memadainya sarana pendukung bagi instansi pengelola PAD dan terbatasnya aparatur yang turut mengelola pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal. Dengan demikian, hasil penerimaan yang dicapai pun masih relatif rendah atau tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Lemahnya penegakan hukum atau sanksi bagi wajib pajak juga mempengaruhi kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Qanun-qanun yang mengatur PAD termasuk sanksinya, namun akibat lemahnya penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi tersebut disinyalir wajib pajak semakin leluasa untuk tidak membayar pajak.

Tingkat pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah turut pula menyebabkan kontribusi PAD relatif kecil terhadap penerimaan daerah. Kondisi ini terjadi akibat minimnya investasi di Nagan Raya. Hingga saat ini aktivitas ekonomi masih sangat bergantung dari pengeluaran (belanja) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sementara peran dunia usaha/swasta masih relatif kecil dalam mendorong percepatan ekonomi daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD merupakan keharusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan berbagai sumber PAD dapat dilakukan pada tingkatan kebijakan dan administrasi. Upaya peningkatan PAD dengan kebijakan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi jenis pungutan retribusi daerah serta memperbaiki administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk intensifikasi pungutan pajak dan retribusi.

Selanjutnya, strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pemungutan penerimaan potensi objek-objek PAD yang sudah berjalan (*on-going*)

yang didukung dengan penyempurnaan atau Qanun-qanun yang telah ada, pemantapan sumberdaya pemungut, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan objek-objek PAD yang sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku disertai dengan qanun, dan optimalisasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi berbasis sektor unggulan.

4.1.6 Nilai Tambah Pertanian yang Masih Rendah

Struktur ekonomi kabupaten Nagan Raya bertumpu pada sektor pertanian sebagai leading sektor. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Nagan Raya menempati urutan teratas. Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Nagan Raya. Namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama Nagan Raya masih rendah. Sebagian besar komoditas pertanian belum diolah dan dijual dalam bentuk bahan mentah. Hal ini menimbulkan kerentanan jika terjadi gejolak harga komoditas lokal dan global.

Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah komoditas pertanian di Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai tambah yang diraih di sektor pertanian. Pengolahan komoditas pertanian menjadi penting dan harus dilaksanakan secara terencana, integral, dan terpadu antarsubsystem dalam upaya meningkatkan nilai tambah, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan komoditas. Karena itu, perubahan paradigma pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari produk-produk pertanian.

4.1.7 Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sepanjang tahun 2007-2010 masih cenderung tumbuh lambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir. Kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya juga menunjukkan fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan fondasi ekonomi Kabupaten Nagan Raya masih rawan dari berbagai gejolak dan guncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Akhir tahun 2010, tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,12 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,46 persen dan Provinsi Aceh sebesar 5,32 persen.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya berkait erat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Permasalahannya, antara lain, berupa masih terbatasnya investasi swasta, minimnya anggaran yang diimplementasikan untuk sektor-sektor produktif, dan belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya ekonomi lokal. Karena itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan diarahkan kebijakan yang lebih tepat dan terarah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kebijakan yang dapat mendorong minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu sangat penting diupayakan, disamping pula berupaya keras mendorong meningkatkan kapasitas UMKM dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perluasan penyerapan tenaga kerja.

4.1.8 Rendahnya Produktivitas Koperasi dan UMKM

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan dan menempati posisi strategis dalam upaya mendorong perekonomian Kabupaten Nagan Raya, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan yang digulirkan kurun waktu lima tahun terakhir diakui bahwa berdampak positif dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM masih pula dihadapkan berbagai permasalahan klasik yang belum teratasi secara tuntas sehingga memerlukan penanganan cepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah tersebut telah menyebabkan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM di Kabupaten Nagan Raya.

Permasalahan spesifik yang dihadapi koperasi dan UMKM di Kabupaten Nagan Raya mencakup terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, kurang kondusifnya iklim usaha, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Kurang kondusifnya iklim usaha di antaranya terkait dengan lemahnya koordinasi lintas SKPK dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, persaingan usaha yang tidak sehat, dan pungutan sebagai sumber PAD yang memberatkan UMKM. Kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang lemah akibat manajemen pengelolaan koperasi kurang profesional, koperasi terbentuk tanpa didasari kepentingan ekonomi bersama, dan masih adanya pertentangan kepentingan dalam koperasi.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian sungguh-sungguh mengingat Kabupaten Nagan Raya berada di lintasan strategis di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh. Bahkan, dalam jangka menengah ke depan Kabupaten Nagan Raya harus menjadi sentral perdagangan barang dan jasa terbesar di wilayah barat-selatan Aceh yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur energi (listrik). Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2012-2017 diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, dan pemerataan peningkatan pendapatan.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional, dirangkum isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Implementasi Syariat Islam di seluruh sendi kehidupan masyarakat belum optimal;
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum sepenuhnya terwujud secara nyata;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata;
5. Pelayanan kesehatan berkualitas belum merata;
6. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal; dan
7. Masih rendahnya investasi dan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah.